Akulturası Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Praktik Perkawinan dan Pewarisan di Komunitas Muslim Indonesia

Fitri Kurniawati¹, Imahda Khoiri Furqon²

^{1,2} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: ¹ fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id, ² Imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji harmonisasi hukum Islam dan tradisi lokal dalam praktik perkawinan dan pewarisan di komunitas Muslim Indonesia, dengan fokus pada wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis interaksi antara syariat Islam dan adat Jawa, seperti upacara siraman dalam perkawinan dan sistem pewarisan bilateral atau matrilineal. Temuan menunjukkan bahwa akulturasi ini menghasilkan praktik yang memperkaya nilai spiritual dan sosial, namun juga menghadapi tantangan berupa konflik nilai, pengaruh modernisasi, dan ketimpangan gender. Solusi seperti pendidikan agama yang inklusif, dialog antara ulama dan tokoh adat, serta pendekatan hukum fleksibel seperti takharrūj dan musyawarah keluarga terbukti efektif dalam menjembatani syariat dan adat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual untuk memastikan relevansi hukum keluarga Islam di tengah keragaman budaya Indonesia, sekaligus merekomendasikan studi lanjutan untuk memperkuat harmonisasi ini.

Kata kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Harmonisasi syari'at-adat

Abstract: This article examines the harmonization of Islamic law and local traditions in the practices of marriage and inheritance within Indonesian Muslim communities, with a focus on the regions of Pekalongan, Batang, and Pemalang. Employing a qualitative approach based on a literature review, this study analyzes the interaction between Islamic sharia and Javanese customs, such as the siraman ceremony in marriage and bilateral or matrilineal inheritance systems. The findings reveal that this acculturation enriches spiritual and social values but also faces challenges, including value conflicts, the impact of modernization, and gender disparities. Solutions such as inclusive religious education, dialogue between religious scholars and traditional leaders, and flexible legal approaches like takharrūj and family consensus (musyawarah) have proven effective in bridging sharia and local customs. This study underscores the importance of a contextual approach to ensure the relevance of Islamic family law amidst Indonesia's cultural diversity, while recommending further research to strengthen this harmonization.

Keywords: Islamic Law, Marriage, Inheritance, Sharia-Custom Acculturation

Pendahuluan

Hukum Islam, sebagai landasan normatif bagi umat Muslim, memainkan peran sentral dalam mengatur aspek-aspek kehidupan seperti perkawinan dan pewarisan. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan hukum Islam sering kali berinteraksi dengan tradisi lokal yang beragam, menciptakan dinamika akulturasi yang unik. Proses ini terlihat jelas dalam praktik perkawinan dan pewarisan di berbagai komunitas Muslim, termasuk di Jawa, seperti di wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Akulturasi ini tidak hanya mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan budaya lokal, tetapi juga menghadapi tantangan berupa konflik nilai dan tekanan modernisasi.¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam

¹ Euis Nurlaelawati, "Change and Continuity: The Kompilasi and Indonesian Islamic Courts'," *Studia Islamika* 14, no. 1 (1970), <https://doi.org/10.15408/sdi.v14i1.559>.

praktik perkawinan dan pewarisan di komunitas Muslim Jawa, dengan fokus pada bagaimana pendekatan kontekstual dapat menjembatani keduanya.

Studi tentang akulturasi hukum Islam dan tradisi lokal telah banyak dilakukan di Indonesia. Misalnya, Huda et al. (2024) menyoroiti bagaimana tradisi Jawa, seperti upacara siraman, diintegrasikan dalam perkawinan Muslim untuk memperkaya nilai spiritual Islam. Demikian pula, dalam konteks pewarisan, Saniah dan Bastomi (2022) menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing di Sumatra Utara menggabungkan hukum waris Islam dengan tradisi lokal melalui musyawarah keluarga.² Penelitian lain oleh Arfiansyah et al. (2023) mengungkapkan adanya praktik matrifokalitas dalam masyarakat Gayo yang berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, namun tetap diakomodasi melalui negosiasi budaya.³ Selain itu, Masrokhin dan Qibtiyah (2022) mendokumentasikan akulturasi dalam tradisi ben-ghiben di Bangkalan, Madura, yang mengintegrasikan hukum Islam dengan ritus lokal dalam perkawinan.⁴

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek deskriptif akulturasi, seperti menggambarkan praktik atau tradisi tertentu, tanpa menggali secara mendalam strategi praktis untuk mengatasi konflik nilai antara syariat dan adat, terutama dalam konteks modernisasi.⁵ Selain itu, penelitian tentang akulturasi di wilayah Jawa Tengah, khususnya Pekalongan, Batang, dan Pemalang, masih terbatas dibandingkan dengan studi tentang Jawa Timur atau Sumatra. Padahal, wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik budaya yang khas, seperti pengaruh tradisi pesisir dan pedalaman, yang dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika akulturasi.⁶ Gap penelitian ini menjadi dasar untuk mengeksplorasi bagaimana solusi kontekstual, seperti pendidikan agama, dialog ulama-tokoh adat, dan musyawarah keluarga, dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai harmonisasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal di Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Dengan menyoroiti tantangan seperti konflik nilai dan pengaruh modernisasi, penelitian ini berupaya mengisi gap penelitian dengan

² Nur Saniah and Ahmad Bastomi, "Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra," *Fenomena* 21, no. 2 (2022): 255–70, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v21i2.134>.

³ Arfiansyah, Nanda Amaliana, and Anton Widyanto, "The Emerging Practice of Matrifocality and Its Implication to the Practice of Islamic Law Family: A Case from Gayo Community, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 23, no. 2 (2023): 380–403.

⁴ Masrokhin Masrokhin and Mariyatul Qibtiyah, "Acculturation of Islamic Law and Local Tradition of Ben-Ghiben in Marriage in Bangkalan-Madura District," *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 125–36, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i2.3926>.

⁵ Hazar Kusmayanti et al., "Contradiction Implications of the Receptie a Contrario Theory in Minangkabau Inheritance," *Justicia Islamica* 21, no. 2 (2024): 347–66, <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.8859>.

⁶ Muhamad Habib et al., "Javanese Inheritance Traditions Seen from Islamic Inheritance Law and Inheritance Law" 8, no. 3 (2024): 1520–26, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.6865/http>.

menawarkan wawasan baru tentang strategi harmonisasi yang relevan secara budaya dan agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang inklusif di Indonesia, sekaligus mendorong studi lanjutan untuk memperkuat akulturasi di tengah keragaman budaya.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki keragaman budaya yang kaya yang memengaruhi penerapan hukum Islam, terutama dalam ranah hukum keluarga seperti perkawinan dan pewarisan. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fikih, sering kali berinteraksi dengan tradisi lokal atau adat yang telah mengakar di masyarakat. Interaksi ini menciptakan dinamika unik, di mana hukum Islam dan adat saling menyesuaikan untuk membentuk praktik yang relevan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana praktik perkawinan dan pewarisan di komunitas Muslim Indonesia mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal, dengan fokus pada tantangan dan solusi yang muncul dari proses ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk mengkaji akulturasi hukum Islam dan tradisi lokal dalam praktik perkawinan dan pewarisan di komunitas Muslim Indonesia, khususnya di wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, seperti interaksi antara syariat Islam dan adat lokal.⁷ Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber akademik, termasuk jurnal, buku, dan prosiding, yang relevan dengan topik akulturasi hukum Islam dan tradisi lokal.

Penelitian ini diawali dengan proses identifikasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur akademik yang relevan, khususnya yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2025. Fokus utama diarahkan pada kajian mengenai hukum Islam, praktik perkawinan dan pewarisan, serta proses akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia. Sumber data utama berasal dari jurnal ilmiah bereputasi seperti *Studia Islamika*, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, dan *Fenomena*, serta prosiding-prosiding seminar yang terkait dengan tema penelitian. Salah satu literatur penting yang dijadikan acuan adalah tulisan Jamil (2003), yang membahas perlindungan perempuan dalam konteks hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Literatur-literatur ini dipilih secara selektif berdasarkan relevansi tematik dan kredibilitasnya, dengan mengacu pada indeks akademik seperti Semantic Scholar.⁸

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses analisis data yang dilakukan melalui pendekatan content analysis atau analisis isi. Metode ini digunakan

⁷ J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage Publications, 2014).

⁸ A. Jamil, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Dan Kewarisan)," *In Proceedings of the National Seminar on Islamic Law in Indonesia*, 2003, <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:151848817>.

untuk menelaah secara sistematis pola-pola, tema-tema utama, serta temuan-temuan penting yang berkaitan dengan proses akulturasi antara hukum Islam dan tradisi lokal. Informasi yang diperoleh dikategorikan ke dalam sejumlah tema, antara lain praktik perkawinan seperti akad nikah dan pelaksanaan upacara adat seperti siraman praktik pewarisan seperti pengaruh sistem kekerabatan matrilineal atau bilateral tantangan dalam proses akulturasi, serta solusi yang ditawarkan oleh para akademisi.⁹ Selain itu, konteks geografis juga menjadi pertimbangan penting, dengan fokus utama pada wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang, guna memastikan relevansi lokal dari hasil analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis yang merujuk pada teori akulturasi budaya yang dikembangkan oleh Berry (1997). Dalam kerangka tersebut, terdapat empat strategi akulturasi: integrasi, asimilasi, separasi, dan marginalisasi. Dari keempat strategi tersebut, penelitian ini memilih untuk memfokuskan kajian pada strategi integrasi, yaitu usaha untuk mengharmonisasikan nilai-nilai hukum Islam dengan tradisi lokal, sehingga menghasilkan praktik hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif di tingkat masyarakat. Untuk memperkuat kerangka analisis, digunakan pula pendekatan antropologi hukum, yang memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial dan budaya dalam penerapan hukum Islam, khususnya di kalangan masyarakat Jawa (lihat Huda et al., 2024).¹⁰

Demi menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh dan konsisten. Prosedur analisis dilakukan secara sistematis dan transparan, dilengkapi dengan dokumentasi yang rinci mengenai proses seleksi dan analisis literatur. Adapun potensi keterbatasan yang melekat pada metode studi literatur seperti ketergantungan pada data sekunder diantisipasi dengan mengutamakan literatur-literatur yang tidak hanya relevan secara tematik, tetapi juga didasarkan pada metodologi penelitian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian literatur yang membahas akulturasi antara hukum Islam dan adat lokal, khususnya dalam konteks praktik perkawinan dan pewarisan di Indonesia. Fokus geografis diarahkan pada komunitas Muslim di wilayah Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Meskipun demikian, data dari wilayah lain seperti Jawa Timur dan Sumatra Utara juga disertakan sebagai bahan perbandingan guna memperkaya perspektif analitis.¹¹ Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi, melainkan sepenuhnya

⁹ M. Arskal Salim, "Hukum Islam Dan Kesetaraan Jender Di Indonesia," *Studia Islamika*, 2014, <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:145078742>.

¹⁰ Huda Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim.," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2024): 25-44, <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:270685096>.

¹¹ Saniah and Bastomi, "Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra."

mengandalkan analisis terhadap data sekunder untuk menggali pemahaman baru tentang harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal.

Pembahasan

Interaksi Hukum Islam dan Tradisi Lokal dalam Perkawinan

Perkawinan dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariat, seperti keharusan akad nikah, mahar, dan persetujuan kedua mempelai. Namun, di berbagai daerah di Indonesia, praktik perkawinan sering kali dipengaruhi oleh adat. Misalnya, di masyarakat Jawa, tradisi seperti *siraman* (upacara mandi pengantin) atau *midodareni* (malam sebelum pernikahan) menjadi bagian integral dari prosesi pernikahan, meskipun tidak diatur dalam fikih Islam. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat, tetapi menambah dimensi budaya yang memperkaya makna pernikahan.

Perkawinan dalam komunitas Muslim Indonesia, khususnya di Pekalongan, Batang, dan Pemalang, mencerminkan interaksi dinamis antara hukum Islam dan tradisi lokal. Hukum Islam mengatur aspek-aspek esensial perkawinan, seperti akad nikah, yang merupakan syarat sah menurut syariat.¹² Namun, tradisi lokal seperti upacara siraman di Jawa memperkaya dimensi simbolis dan sosial perkawinan. Siraman, misalnya, melambangkan pembersihan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai Islam, meskipun akarnya berasal dari tradisi Jawa pra-Islam.¹³ Prosesi ini sering diintegrasikan dengan doa-doa Islam, menunjukkan upaya masyarakat untuk menyelaraskan adat dengan syariat.

Di wilayah pesisir Jawa Tengah, seperti Pekalongan, praktik perkawinan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kesetaraan gender yang diadvokasi dalam hukum Islam modern. Menurut Salim (2014), hukum Islam di Indonesia mulai mengakomodasi kesetaraan gender dalam perkawinan, seperti hak perempuan untuk menentukan mahar atau persetujuan dalam akad.¹⁴ Namun, tradisi lokal seperti seserahan atau pemberian simbolis dari pihak mempelai pria kadang-kadang masih mencerminkan nilai-nilai patriarkal, yang dapat menimbulkan ketegangan dengan prinsip syariat.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa akulturasi tidak selalu berjalan mulus, tetapi melibatkan negosiasi antar nilai.

Penelitian oleh Masrokhin dan Qibtiyah (2022) tentang tradisi ben-ghiben di Madura menawarkan paralel yang relevan. Tradisi ini menggabungkan ritus lokal, seperti pemberian hadiah simbolis, dengan akad nikah Islam, menciptakan harmoni antara adat dan syariat.¹⁶ Di Pekalongan, praktik serupa terlihat dalam tradisi nyantri, di mana calon mempelai pria tinggal di rumah calon mertua untuk menunjukkan

¹² Jamil, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Dan Kewarisan)."

¹³ Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim."

¹⁴ Salim, "Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender Di Indonesia."

¹⁵ Jamil, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Dan Kewarisan)."

¹⁶ Masrokhin and Qibtiyah, "Acculturation of Islamic Law and Local Tradition of Ben-Ghiben in Marriage in Bangkalan-Madura District."

keseriusan, yang kemudian diikuti dengan akad nikah sesuai syariat. Integrasi ini mencerminkan strategi akulturasi jenis integrasi menurut kerangka Berry (1997), di mana kedua sistem nilai dipertahankan tanpa menghilangkan identitas masing-masing.¹⁷

Namun, interaksi ini juga menghadapi tantangan, terutama dari pengaruh modernisasi. Globalisasi dan urbanisasi di wilayah seperti Batang telah mengurangi popularitas beberapa tradisi lokal, seperti midodareni, karena dianggap tidak praktis atau bertentangan dengan efisiensi modern.¹⁸ Selain itu, pemahaman yang kurang mendalam tentang hukum Islam di kalangan masyarakat kadang-kadang menyebabkan misinterpretasi, seperti anggapan bahwa tradisi lokal bertentangan dengan syariat. Pendekatan kontekstual, seperti yang diusulkan oleh Nurlaelawati, menekankan pentingnya pendidikan agama untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang kompatibilitas antara hukum Islam dan tradisi lokal.¹⁹

Studi oleh Fauzi (2019) tentang perkawinan di komunitas Madura menunjukkan bahwa dialog antara ulama dan tokoh adat menjadi kunci dalam menjembatani potensi konflik. Di Pemalang, misalnya, musyawarah antara keluarga dan tokoh masyarakat sering digunakan untuk menentukan bentuk upacara perkawinan yang sesuai dengan syariat sekaligus menghormati adat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat harmoni sosial, tetapi juga memastikan bahwa perkawinan tetap relevan secara budaya dan agama. Dengan demikian, interaksi hukum Islam dan tradisi lokal dalam perkawinan di Jawa Tengah menunjukkan fleksibilitas syariat dalam beradaptasi dengan konteks budaya, sekaligus menyoroti perlunya pendekatan inklusif untuk menjaga harmonisasi.²⁰

Pewarisan: Menjembatani Fikih dan Adat

Hukum pewarisan dalam Islam (*faraid*) mengatur pembagian harta waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, dengan porsi yang jelas untuk ahli waris seperti anak, istri, atau orang tua. Namun, di banyak komunitas Indonesia, sistem adat memengaruhi praktik pewarisan. Misalnya, di masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta pusaka sering kali diwariskan melalui garis ibu, yang berbeda dari prinsip *faraid* yang bersifat bilateral (mengakui garis ayah dan ibu). Untuk menyelaraskan keduanya, masyarakat Minangkabau sering memisahkan harta pusaka (yang diatur adat) dari harta pribadi (yang diatur *faraid*).

Di Jawa, praktik *waris gono-gini* (pembagian harta bersama antara suami dan istri sebelum diwariskan) sering digunakan untuk memastikan keadilan bagi semua

¹⁷ John W. Berry, "Immigration, Acculturation, and Adaptation," *Applied Psychology*, 1997, <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>.

¹⁸ Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim."

¹⁹ Nurlaelawati, "Change and Continuity: The Kompilasi and Indonesian Islamic Courts'."

²⁰ Muhammad Latif Fauzi, "Actors and Norms in an Islamic Marriage: A Study of Madura Community in Rural Eastern East Java," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 297-325, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.297-325>.

pihak, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam fikih. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas masyarakat dalam menggabungkan nilai Islam dan adat. Namun, tantangan seperti ketidakpatuhan terhadap faraid (misalnya, anak perempuan mendapat porsi lebih kecil dari yang ditentukan syariat) masih terjadi, terutama di daerah dengan adat patriarkal yang kuat. Solusi yang umum dilakukan adalah musyawarah keluarga dengan bimbingan ulama atau hakim agama untuk memastikan kepatuhan syariat sekaligus menghormati adat.

Praktik pewarisan di komunitas Muslim Indonesia, termasuk di Pekalongan, Batang, dan Pemalang, mencerminkan upaya untuk menjembatani hukum waris Islam (*farā'idh*) dengan tradisi lokal. Hukum waris Islam menekankan pembagian harta berdasarkan proporsi yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, seperti bagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan dalam beberapa kasus.²¹ Namun, di beberapa komunitas Jawa, tradisi lokal seperti sistem bilateral atau matrilineal masih memengaruhi praktik pembagian waris, terutama dalam hal tanah atau harta keluarga.²²

Di Pekalongan, misalnya, beberapa keluarga masih menerapkan sistem pembagian waris yang mempertimbangkan tradisi Jawa, seperti memberikan porsi lebih besar kepada anak sulung atau anak perempuan yang tinggal bersama orang tua.²³ Praktik ini sering kali bertentangan dengan prinsip *farā'idh*, yang menuntut pembagian yang adil berdasarkan syariat. Namun, musyawarah keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Saniah dan Bastomi (2022) dalam konteks masyarakat Mandailing, menjadi solusi untuk menjembatani perbedaan ini. Musyawarah memungkinkan keluarga untuk mencapai kesepakatan yang menghormati baik syariat maupun adat.²⁴

Penelitian oleh Kusmayanti et al. (2024) tentang pewarisan di Minangkabau menunjukkan bahwa teori *receptie a contrario* sering kali menimbulkan konflik, karena adat Minangkabau yang matrilineal bertentangan dengan hukum Islam yang patrilineal dalam beberapa aspek.²⁵ Di Jawa Tengah, meskipun konflik ini tidak seintens di Minangkabau, tantangan serupa muncul ketika tradisi lokal memprioritaskan perempuan dalam pewarisan tanah keluarga, sementara hukum Islam menekankan distribusi yang lebih egaliter.²⁶ Pendekatan seperti *takharrūj*, yang dijelaskan oleh Takdir et al. (2023), dapat menjadi solusi, di mana hukum Islam

²¹ Saniah and Bastomi, "Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra."

²² Habib et al., "Javanese Inheritance Traditions Seen from Islamic Inheritance Law and Inheritance Law."

²³ Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim."

²⁴ Saniah and Bastomi, "Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra."

²⁵ Kusmayanti et al., "Contradiction Implications of the Receptie a Contrario Theory in Minangkabau Inheritance."

²⁶ Salim, "Hukum Islam Dan Kesetaraan Jender Di Indonesia."

digunakan secara fleksibel untuk mengakomodasi praktik adat tanpa melanggar prinsip syariat.²⁷

Modernisasi juga memengaruhi praktik pewarisan di wilayah penelitian. Di Batang, urbanisasi telah mengurangi ketergantungan pada tanah sebagai harta waris utama, sehingga beberapa keluarga beralih ke pembagian harta bergerak sesuai hukum Islam.²⁸ Namun, hal ini kadang-kadang memicu ketegangan, terutama ketika generasi muda lebih memilih pendekatan syariat ketimbang tradisi lokal yang dianggap kuno. Pendidikan agama dan dialog lintas generasi menjadi penting untuk menjembatani perbedaan ini, sebagaimana diusulkan oleh Nurlaelawati.²⁹

Studi oleh Arfiansyah et al. (2023) tentang masyarakat Gayo menunjukkan bahwa praktik matrifokalitas dapat diintegrasikan dengan hukum Islam melalui negosiasi budaya.³⁰ Di Pemalang, pendekatan serupa terlihat dalam praktik hibah, di mana orang tua memberikan sebagian harta kepada anak tertentu sebelum meninggal untuk memenuhi nilai-nilai adat, sambil tetap mematuhi hukum waris Islam untuk sisa harta.³¹ Pendekatan ini mencerminkan strategi integrasi yang memungkinkan koeksistensi antara fikih dan adat, sekaligus menjaga keharmonisan sosial dalam komunitas.

Tantangan dan Solusi dalam Harmonisasi

Harmonisasi hukum Islam dan tradisi lokal tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah konflik nilai, misalnya ketika adat mendorong praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti pernikahan anak atau pembagian waris yang tidak adil. Selain itu, globalisasi dan modernisasi memperkenalkan nilai-nilai baru yang dapat melemahkan baik hukum Islam maupun adat, seperti preferensi terhadap pernikahan sipil atau pengabaian faraid demi kesepakatan keluarga.

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai strategi telah diterapkan. Pertama, pendidikan agama yang inklusif memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang syariat sekaligus menghargai adat. Kedua, dialog antara ulama, tokoh adat, dan pemerintah membantu merumuskan solusi yang kontekstual, seperti penguatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memastikan akad nikah sesuai syariat. Ketiga, penelitian dan publikasi akademik, seperti yang

²⁷ Mohammad Takdir et al., "The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia," *Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 104–22, <https://doi.org/10.24260/jil.v4i1.1044>.

²⁸ Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim."

²⁹ Nurlaelawati, "Change and Continuity: The Kompilasi and Indonesian Islamic Courts'."

³⁰ Arfiansyah, Amaliana, and Widyanto, "The Emerging Practice of Matrifocality and Its Implication to the Practice of Islamic Law Family: A Case from Gayo Community, Indonesia."

³¹ Sukiati, Muhammad Hidayat, and Muhamad Hasan Sebyar, "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community," *Al-Ulum* 23, no. 1 (2023): 132–52, <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3440>.

Fitri: *Akulturasi Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Praktik ...* dilakukan oleh *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, berkontribusi dalam mendokumentasikan praktik terbaik dan mendorong diskusi lintas budaya.

Harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam praktik perkawinan dan pewarisan di komunitas Muslim Indonesia, khususnya di Pekalongan, Batang, dan Pemalang, menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah konflik nilai antara syariat dan adat. Misalnya, tradisi Jawa seperti siraman dalam perkawinan atau sistem pewarisan bilateral sering kali dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam oleh kelompok yang memegang interpretasi puritan.³² Konflik ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang fleksibilitas hukum Islam, yang sebenarnya memungkinkan akomodasi terhadap budaya lokal melalui pendekatan seperti *ijtihad* atau *takharrūj*.³³

Pengaruh modernisasi dan globalisasi menjadi tantangan lain yang signifikan. Di wilayah seperti Batang, urbanisasi telah mengurangi relevansi beberapa tradisi lokal, seperti upacara *midodareni*, karena dianggap tidak praktis di tengah gaya hidup modern.³⁴ Generasi muda cenderung lebih memilih praktik perkawinan atau pewarisan yang sesuai dengan hukum Islam formal, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), daripada tradisi adat yang dianggap kuno.³⁵ Hal ini menciptakan ketegangan antar generasi, di mana nilai-nilai adat sering kali diabaikan demi efisiensi atau modernitas.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan gender yang kadang-kadang muncul dalam praktik adat. Meskipun hukum Islam mengadvokasi kesetaraan dalam beberapa aspek, seperti hak perempuan atas mahar atau warisan, beberapa tradisi lokal di Jawa Tengah masih mencerminkan nilai-nilai patriarkal. Misalnya, dalam pewarisan, preferensi untuk memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki atau sulung sering kali bertentangan dengan prinsip *farā'idh* yang menekankan pembagian adil.³⁶ Ketimpangan ini dapat memicu sengketa keluarga, terutama di komunitas yang masih kuat memegang tradisi lokal.

Kurangnya dialog antara ulama dan tokoh adat juga menjadi hambatan dalam harmonisasi. Di beberapa kasus, ulama cenderung menolak tradisi lokal tanpa memahami nilai budayanya, sementara tokoh adat kadang-kadang bersikeras mempertahankan praktik yang bertentangan dengan syariat.³⁷ Hal ini terlihat di Pemalang, di mana tradisi seperti *nyantri* kadang-kadang dipandang sebagai tambahan yang tidak perlu dalam perkawinan Islam. Tanpa dialog yang konstruktif, potensi konflik antara syariat dan adat sulit diatasi.

³² Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim."

³³ Takdir et al., "The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia."

³⁴ Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim."

³⁵ Nurlaelawati, "Change and Continuity: The Kompilasi and Indonesian Islamic Courts'."

³⁶ Jamil, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Dan Kewarisan)."

³⁷ Fauzi, "Actors and Norms in an Islamic Marriage: A Study of Madura Community in Rural Eastern East Java."

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pendidikan agama menjadi solusi kunci. Program pendidikan yang menjelaskan kompatibilitas hukum Islam dengan budaya lokal dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akulturasi. Di Pekalongan, misalnya, pesantren dan majelis taklim telah mengadakan sesi diskusi yang mengintegrasikan pengetahuan tentang syariat dan tradisi Jawa, seperti siraman, untuk menunjukkan bahwa keduanya dapat saling melengkapi.³⁸ Pendekatan ini sejalan dengan saran Jamil (2003), yang menekankan pentingnya pendidikan untuk memperkuat perlindungan perempuan dalam hukum perkawinan dan pewarisan Islam.³⁹

Dialog antara ulama dan tokoh adat juga terbukti efektif dalam menjembatani konflik. Penelitian oleh Masrokhin dan Qibtiyah (2022) tentang tradisi ben-ghiben di Madura menunjukkan bahwa kolaborasi antara ulama dan tokoh adat dapat menciptakan praktik perkawinan yang harmonis.⁴⁰ Di Batang, musyawarah yang melibatkan tokoh agama dan adat sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa pewarisan, memastikan bahwa keputusan menghormati baik syariat maupun adat.⁴¹ Pendekatan ini mencerminkan nilai musyawarah yang menjadi inti budaya Indonesia.

Pendekatan hukum yang fleksibel, seperti takharrūj, juga menawarkan solusi praktis. Menurut Takdir et al. (2023), takharrūj memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan lokal tanpa melanggar prinsip syariat.⁴² Di Pematang, praktik hibah sering digunakan untuk mengakomodasi nilai-nilai adat, seperti memberikan harta kepada anak tertentu sebelum pembagian waris resmi, sambil tetap mematuhi hukum farā'idh untuk sisa harta.⁴³ Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi yang kontekstual dan memperkuat kohesi sosial.

Selain itu, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan advokasi hukum dapat mengatasi ketimpangan gender dalam praktik adat. Salim (2014) menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki potensi untuk mempromosikan kesetaraan gender, tetapi memerlukan dukungan dari tokoh masyarakat untuk mengubah persepsi patriarkal.⁴⁴ Di Pekalongan, inisiatif seperti pelatihan hukum keluarga Islam

³⁸ Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim."

³⁹ Jamil, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Dan Kewarisan)."

⁴⁰ Masrokhin and Qibtiyah, "Acculturation of Islamic Law and Local Tradition of Ben-Ghiben in Marriage in Bangkalan-Madura District."

⁴¹ Saniah and Bastomi, "Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra."

⁴² Takdir et al., "The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia."

⁴³ Sukiati, Hidayat, and Hasan Sebyar, "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community."

⁴⁴ Salim, "Hukum Islam Dan Kesetaraan Jender Di Indonesia."

bagi perempuan telah membantu meningkatkan kesadaran tentang hak waris dan perkawinan sesuai syariat.⁴⁵

Penguatan institusi lokal, seperti pengadilan agama, juga dapat mendukung harmonisasi. Nurlaelawati mencatat bahwa pengadilan agama di Indonesia sering memainkan peran penting dalam menengahi sengketa antara hukum Islam dan adat. Di Batang, pengadilan agama telah memfasilitasi musyawarah untuk menyelesaikan konflik pewarisan, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan syariat sekaligus sensitif terhadap nilai-nilai adat. Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum Islam di mata masyarakat.

Secara keseluruhan, harmonisasi hukum Islam dan tradisi lokal memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pendidikan, dialog, dan fleksibilitas hukum. Dengan mengintegrasikan solusi-solusi ini, komunitas Muslim di Pekalongan, Batang, dan Pemalang dapat menciptakan praktik perkawinan dan pewarisan yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga relevan secara budaya, sehingga memperkuat identitas keagamaan dan sosial mereka di tengah tantangan modernisasi.

Kesimpulan

Praktik perkawinan dan pewarisan di komunitas Muslim Indonesia menunjukkan bagaimana hukum Islam dan tradisi lokal dapat diselaraskan untuk menciptakan sistem yang harmonis dan relevan secara budaya. Meskipun tantangan seperti konflik nilai dan pengaruh modernisasi tetap ada, pendekatan seperti pendidikan, dialog, dan musyawarah telah terbukti efektif dalam menjembatani hukum Islam dan adat. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika ini di berbagai daerah di Indonesia, sehingga harmonisasi ini dapat terus diperkuat di masa depan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akulturası hukum Islam dan tradisi lokal dalam praktik perkawinan dan pewarisan di komunitas Muslim Indonesia, khususnya di Pekalongan, Batang, dan Pemalang, mencerminkan dinamika yang kompleks namun kaya akan potensi harmonisasi. Dalam perkawinan, tradisi lokal seperti siraman dan nyantri diintegrasikan dengan akad nikah Islam, menciptakan praktik yang memperkaya dimensi spiritual dan sosial tanpa melanggar syariat. Dalam pewarisan, meskipun sistem bilateral atau matrilineal Jawa kadang-kadang bertentangan dengan hukum farā'idh, pendekatan seperti musyawarah keluarga dan hibah berhasil menjembatani syariat dan adat, memastikan pembagian harta yang adil sekaligus menghormati nilai budaya.

Tantangan utama dalam harmonisasi ini meliputi konflik nilai antara syariat dan adat, pengaruh modernisasi yang mengurangi relevansi tradisi lokal, ketimpangan gender dalam praktik adat, dan kurangnya dialog antara ulama dan tokoh adat. Solusi seperti pendidikan agama yang inklusif, dialog ulama-tokoh adat, pendekatan hukum fleksibel seperti takharrūj, pemberdayaan perempuan, dan penguatan institusi lokal

⁴⁵ Jamil, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Dan Kewarisan)."

seperti pengadilan agama terbukti efektif dalam mengatasi tantangan ini. Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan di tengah keragaman budaya Indonesia, sekaligus memperkuat kohesi sosial dalam komunitas.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menerapkan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan mengintegrasikan syariat dan adat melalui musyawarah, pendidikan, dan fleksibilitas hukum, komunitas Muslim di Pekalongan, Batang, dan Pemalang dapat menciptakan praktik perkawinan dan pewarisan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga menghormati identitas budaya lokal. Studi ini merekomendasikan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi strategi harmonisasi di wilayah lain di Indonesia, serta pengembangan program pendidikan yang lebih luas untuk meningkatkan literasi hukum Islam dan kesadaran budaya di kalangan masyarakat.

Referensi

- Arfiansyah, Nanda Amaliana, and Anton Widyanto. "The Emerging Practice of Matrilocality and Its Implication to the Practice of Islamic Law Family: A Case from Gayo Community, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 23, no. 2 (2023): 380–403.
- Berry, John W. "Immigration, Acculturation, and Adaptation." *Applied Psychology*, 1997. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, 2014.
- Fauzi, Muhammad Latif. "Actors and Norms in an Islamic Marriage: A Study of Madura Community in Rural Eastern East Java." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 297–325. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.297-325>.
- Habib, Muhamad, Az Zahra, Nashira Ryan, and Erlinda Putri Nurdiyanti. "Javanese Inheritance Traditions Seen from Islamic Inheritance Law and Inheritance Law" 8, no. 3 (2024): 1520–26. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.6865/http>.
- Jamil, A. "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Dan Kewarisan)." *In Proceedings of the National Seminar on Islamic Law in Indonesia*, 2003. <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:151848817>.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Mulyanto, Deviana Yunitasari, and Muhammadafeefee Assalihee. "Contradiction Implications of the Receptie a Contrario Theory in Minangkabau Inheritance." *Justicia Islamica* 21, no. 2 (2024): 347–66. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.8859>.
- Masrokhin, Masrokhin, and Mariyatul Qibtiyah. "Acculturation of Islamic Law and Local Tradition of Ben-Ghiben in Marriage in Bangkalan-Madura District." *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 125–36. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i2.3926>.
- Miftahul, Agus Purnomo, Abdul Mun'im, Luthfi HadiAminuddin, Lukman Santoso, Huda. "Tradition, Wisdom and Negotiating Marriage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2024): 25–44.

<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:270685096>.

Nurlaelawati, Euis. "Change and Continuity: The Kompilasi and Indonesian Islamic Courts'." *Studia Islamika* 14, no. 1 (1970). <https://doi.org/10.15408/sdi.v14i1.559>.

Salim, M. Arskal. "Hukum Islam Dan Kesetaraan Jender Di Indonesia." *Studia Islamika*, 2014. <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:145078742>.

Saniah, Nur, and Ahmad Bastomi. "Acculturation of Traditional and Islamic Law in the Practice of Inheritance Distribution of the Mandailing Tribe of North Sumatra." *Fenomena* 21, no. 2 (2022): 255–70. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v21i2.134>.

Sukiati, Muhammad Hidayat, and Muhamad Hasan Sebyar. "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community." *Al-Ulum* 23, no. 1 (2023): 132–52. <https://doi.org/10.30603/au.v23i1.3440>.

Takdir, Mohammad, Fajrul Munir, Ali Ludhfi, Muliyanzah, and Zainol Muttaqin. "The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia." *Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 104–22. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i1.1044>